

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan

Putu Ayu Puji Laksmi Dewi¹, Animah^{2*}, Yusli Mariadi³

^{1,2,3}Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Abstract

The effectiveness of SIMDA implementation is the result of the extent to which a public sector organization can produce financial reports in accordance with predetermined criteria and in order to assist information technology-based financial management. The purpose of this research to analyze the effectiveness of the implementation of SIMDA in the regional secretary of Mataram City, especially the general section. The research method used in this research is descriptive qualitative with a phenomenological approach. Data collection techniques are in the form of library research and observation consisting of indepth interviews and documentation. The result of this research indicate that the implementation of SIMDA at the City of Mataram, especially the general section has been running effectively. This can be seen from the employees who have understood the meaning of SIMDA, the success of the program, the success of the target, the satisfaction of using SIMDA, and the suitability of the results. Other factors owned by the regional secretary of Mataram City also support the effective implementation of SIMDA such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

Keywords: *effectiveness; financial management; SIMDA.*

Abstrak

Efektivitas penerapan SIMDA adalah hasil dari sejauh mana suatu organisasi sektor publik dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan dalam rangka untuk membantu pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan SIMDA pada sekretariat daerah Kota Mataram khususnya bagian umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data adalah berupa penelitian kepustakaan dan observasi yang terdiri atas wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIMDA pada sekretariat daerah kota mataram khususnya bagian umum telah berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari para pegawai yang telah memahami makna SIMDA, keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan penggunaan SIMDA, dan kesesuaian hasil. Faktor-faktor lain yang dimiliki sekretariat daerah Kota Mataram juga mendukung penerapan SIMDA dapat dijalankan secara efektif seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: efektivitas, pengelolaan keuangan, SIMDA.

^{2*} Penulis Koresponden. animahmtr@unram.ac.id

PENDAHULUAN

Otonomi daerah membantu mempercepat perkembangan organisasi sektor publik di Indonesia menjadi lebih optimal. Pemerintah daerah (Pemda) dapat mengendalikan serta mengatur urusan pemerintahannya sendiri menurut undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan agar tercapainya kemakmuran masyarakat melalui pemberdayaan daerah, pelayanan masyarakat, penguatan tugas masyarakat, dan peningkatan daya saing di daerah yang dipadukan dengan prinsip kerakyatan/demokrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah menurut Nag dalam Sindonews (2018) tidak sebaik yang kita lihat di depan mata. Terdapat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan dalam pelaksanaan otonomi daerah oleh aparatur daerah. Para aparatur daerah banyak yang berlomba-lomba untuk memperkaya diri sendiri atau lebih dikenal dengan istilah korupsi. Adapun jenis korupsi yang dilakukan seperti penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), izin berbisnis, dan penyusunan pembangunan proyek penting daerah, telah menjadi identitas otonomi daerah saat ini yang tidak memenuhi kriteria pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Contohnya seperti di Nusa Tenggara Barat, Lombok sedang berjalan proyek pembangunan daerah yaitu *rest area* tepatnya pada wilayah Senggigi. Namun, dalam pembangunannya mengalami kegagalan proyek karena longsor. Menurut Nur dalam Lombokpost (2021) pembangunan proyek tersebut terindikasi kasus korupsi sehingga sedang dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwajib karena menimbulkan kerugian negara. Berdasarkan hal tersebut otonomi daerah memerlukan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan (*clean governance*).

Pemberdayaan daerah dalam bentuk otonomi daerah memerlukan pengelolaan yang baik (*good governance*) oleh pemerintah daerah (Syarifuddin, 2020). Dalam proses pelaksanaan *good governance*, pemerintah daerah membutuhkan sistem yang handal sehingga dapat mengumpulkan dan mengolah data serta memberikan informasi kepada pemerintah daerah untuk membantu mereka mengambil keputusan tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (Ashari et al., 2019). Hal ini memberikan hak kepada setiap daerah mengembangkan dan merencanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Persiapan terkait dan rencana pembangunan meliputi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 mengenai sistem informasi keuangan daerah, pemerintah daerah harus memanfaatkan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi, mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, dan transparansi lembaga keuangan daerah. Adapun cara untuk menggunakan teknologi informasi adalah menggunakan perangkat lunak (*software*) sebagai pendukung dalam sistem, akuntansi dan pelaporan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem yang baik untuk mengelola keuangan daerah secara akurat (rinci), tepat waktu (*on time*), transparan dan bertanggung jawab. Sistem teknologi yang digunakan dalam mengelola keuangan organisasi sektor publik telah dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), berbasis teknologi yang dirancang untuk membantu pemerintah bertanggung jawab di tingkat pelaporan serta mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan.

Bagian umum sekretariat daerah Kota Mataram adalah salah satu contoh dari banyak instansi pemerintah yang mengaplikasikan SIMDA untuk mengelola laporan keuangan sejak tahun 2008 hingga saat ini. Efektivitas dalam penerapan SIMDA merupakan parameter kegagalan dan keberhasilan suatu organisasi ketika mencapai tujuannya, dengan kata lain menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, sebanding, dan dapat dipahami berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SIMDA merupakan sebuah

kebijakan pemerintah Kota Mataram berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah telah digunakan oleh semua satuan kinerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Mataram.

Sehubungan dengan hal diatas, beberapa penelitian tentang efektivitas penerapan SIMDA telah dilakukan misalnya, Ermawati (2018), Pangestika dan Sari (2016), Wulandari (2019) berpendapat bahwa penerapan SIMDA pada masing-masing pemerintah daerah telah berjalan secara efektif atau sudah terorganisir dengan baik. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Hertanto (2017) dan Manossoh (2017) yang menyimpulkan bahwa penerapan SIMDA dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif atau terdapat beberapa faktor pendukung yang belum terpenuhi dari masing-masing faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi seperti yang dinyatakan teori implementasi kebijakan bahwa suatu kebijakan jika tidak direncanakan dengan baik implementasinya maka, tujuan kebijakan tersebut tidak akan terwujud begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hal diatas, penelitian ini dilakukan atas dasar peneliti ingin menganalisis penerapan SIMDA pada sekretariat daerah Kota Mataram khususnya bagian umum telah berjalan efektif atau belum. Peneliti tertarik melakukan penelitian yang didasarkan dari penelitian Ermawati (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya dan indikator yang digunakan untuk menentukan efektivitas juga berbeda.

Teori implementasi kebijakan pertama kali diperkenalkan oleh George Edward dengan menerbitkan buku yang berjudul *Implementing Public Policy*. Menurut Nurani (2018) implementasi kebijakan merupakan proses yang penting karena jika kebijakan publik tidak dilaksanakan dengan baik, tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai. Oleh karena itu, jika kebijakan publik implementasinya telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik tetapi kebijakannya belum dirumuskan dengan benar, maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai, sehingga untuk mencapai tujuan kebijakan diperlukan persiapan kebijakan dan implementasinya yang direncanakan dengan baik. Teori implementasi kebijakan ini memiliki empat variabel penting yaitu: (1) Komunikasi (*communication*), (2) Sumber Daya Manusia (*resources*), (3) Disposisi/sikap (*diposition*), dan (4) Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*).

Menurut Sedianingsih, Mustikawati, and Soetanto (2010) efektif adalah bagaimana Anda melakukan hal yang benar (*do the right thing*), yaitu bagaimana Anda mencapai tujuan tersebut. Menurut Gibson (2001: 120) dalam Pombengi (2018), mendefinikan efektivitas sebagai pencapaian tujuan usaha bersama sehingga tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Pengorbanan yang dikeluarkan menjadi penentu tercapainya tujuan dan sasaran tersebut. Efektivitas digunakan untuk mengukur antara perencanaan dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Menurut Campbell dalam Baria (2019) terdapat beberapa indikator dalam pengukuran efektivitas yaitu: (1) keberhasilan program, keberhasilan program yang efektif dapat dilihat dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan di lapangan. Efektivitas program dapat dilakukan dengan kemampuan pelaksanaan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, (2) keberhasilan sasaran, keberhasilan sasaran yang efektif dapat diukur dari seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dari organisasi tersebut terlaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan yang dipusatkan pada aspek output, (3) kepuasan terhadap program, kepuasan terhadap program dapat diukur berdasarkan kepuasan yang dirasakan oleh orang-orang yang menggunakannya terhadap kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Jika berkualitas tentunya tingkat kepuasan pengguna akan semakin tinggi, sehingga dapat menimbulkan keuntungan bagi organisasi. Kepuasan merupakan suatu ciri-ciri efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan orang-orang yang menggunakan, dan (4) kesesuaian input dan output, tolak ukur efektivitas untuk kesesuaian

input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara input dengan output. Jika input tidak sesuai dengan output maka dapat dikatakan bahwa program tersebut tidak efektif.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sehingga memberikan akuntabilitas keuangan pemerintah yang berkualitas tinggi untuk mentransformasi pemerintahan daerah, sektor yang baik menjadi pemerintahan yang lebih baik dan lebih bersih, tujuannya adalah untuk mencapai tanggung jawab. SIMDA merupakan produk penerapan Prinsip E-Government yang dihasilkan dari terbitnya Ordonansi No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan E-Government, selanjutnya diakui dengan adanya Peraturan No. 21 dari Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Pusat No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Ganevie, 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I.02 PSAP 01-6) laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, pelaksanaan anggaran, surplus anggaran, arus kas, dan perubahan ekuitas perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan sektor publik secara khusus untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan tanggung jawab entitas pelapor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk melakukan analisis dan interpretasi dari hasil wawancara dengan harapan dapat menemukan makna dari suatu fenomena (Sugiyono, 2018). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Menurut Muhammad (2018) fenomenologi merupakan pendekatan penelitian yang berada dalam ranah pengalaman manusia. Penelitian fenomenologi pada umumnya melihat antara realitas dengan fenomena yang terjadi secara alami. Riset fenomenologi harus mampu menjelaskan makna secara umum yang terdapat dalam pengalaman hidup para informan terkait dengan penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan data yang diolah berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) kepada informan-informan peneliti. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer peneliti peroleh dengan melakukan wawancara kepada informan kunci yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) bagian umum sekretariat daerah Kota Mataram, pembantu PPK-SKPD bagian umum sekretariat daerah Kota Mataram, admin Badan Keuangan daerah Kota Mataram, staf pelaporan keuangan Sekretariat Daerah Kota Mataram, bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kota Mataram, bendahara pengeluaran pembantu bagian umum sekretariat daerah Kota Mataram, dan para staf yang relevan dengan penelitian ini. Data Sekunder, merupakan data yang sudah diolah atau yang penulis peroleh dari dokumen-dokumen pada sekretariat daerah Kota Mataram khususnya bagian umum seperti laporan keuangan yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*observation*). Penelitian lapangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan cara melakukan tanya jawab kepada informan peneliti dan dokumentasi (*documentation*).

Penelitian ini melakukan pengujian keabsahan data menurut Sugiyono (2018: 181) yang meliputi uji *credibility* (validitas internal), uji *transferability* (validitas eksternal), uji *dependability* (reabilitas), dan uji *confirmability* (objektivitas). Uji kredibilitas dilakukan dengan metode triangulasi, *member-check*, pengamatan terus menerus, dan bahan referensi. Metode triangulasi

adalah metode dengan tidak hanya mengumpulkan data dari satu sumber saja melainkan dari banyak sumber yang menunjukkan informasi yang relevan. *Member-check* merupakan metode yang mengoreksi ulang data atau hasil wawancara oleh subjek penelitian. Tujuan *member-check* adalah untuk memeriksa kembali seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh narasumber/informan penelitian. Pengamatan terus-menerus, agar penulis dapat melihat data penelitian dengan cermat. Menggunakan bahan referensi, menurut Sugiyono (2018: 192) bahan referensi merupakan alat pendukung dalam pembuktian data yang digunakan oleh peneliti misalnya, data hasil wawancara yang didukung dengan adanya rekaman wawancara, data tentang interaksi atau gambaran didukung dengan foto.

Penelitian ini berlokasi di Kantor Walikota Mataram Sekretariat Daerah Kota Mataram yang berkedudukan di Jalan Pejanggalik No. 16 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurang lebih selama enam bulan terhitung dari tanggal 15 Maret 2021 hingga 30 September 2021.

Penelitian ini menggunakan informan yang dapat memberikan peneliti informasi yang relevan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Informan tersebut antara lain adalah: admin Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, PPK-SKPD dan kasubag bagian keuangan sekretariat daerah Kota Mataram, pembuat laporan sekretariat daerah Kota Mataram, pembantu PPK-SKPD sekretariat daerah Kota Mataram, bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kota Mataram, verifikator sekretariat daerah Kota Mataram, pembuat daftar gaji sekretariat daerah Kota Mataram, dan bendahara pengeluaran pembantu setiap bagian sekretariat daerah Kota Mataram.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Dodik Siswo Suharto, S.Sos	Admin Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
2.	Desi Tri Mariana, SE	PPK-SKPD dan Kasubag Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kota Mataram
3.	Siti Rahimah Nurdiana, SH.,M.Ak	Pembuat Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mataram
4.	Baiq Marniati, SE	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Mataram
5.	Nurhidayah	Pembantu PPK-SKPD Sekretariat Daerah Kota Mataram
6.	Ketut Sumirta	Verifikator Sekretariat Daerah Kota Mataram
7.	Ari Nurul Haeni	Pembuat Daftar gaji
8.	Kurniawan, SH	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mataram
9.	Aidin, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mataram
10.	Susan Ariani	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mataram
11.	Siti Maysaroh, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian

No.	Nama Informan	Jabatan
		Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Mataram
12.	Baiq Leni Andriani	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram
13.	Lalu Topan Sugiarta	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Mataram
14.	Lalu Irwan Rahadi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mataram
15.	Sri Wahyuni	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Mataram
16.	Wahyu Gunawan	Pengadministrasi Umum Bagian Keuangan

Sumber: Data Primer Diolah (2021).

Model Miles dan Huberman merupakan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti. Tahapan-tahapan yang terdapat dalam model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut: (1) Reduksi Data (*Data Reduction*), (2) penyajian data (*data display*), dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

Reduksi Data (*Data Reduction*). Sugiyono (2018: 134) mendefinisikan reduksi data adalah proses merangkum, memilih, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Pada penelitian ini, data yang kompleks dan jumlahnya banyak harus dipilah oleh penulis agar mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian sehingga dapat memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mempermudah dalam proses mereduksi data.

Penyajian Data (*Data Display*). Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2018: 137) menyatakan bahwa "*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Hal tersebut menyatakan bahwa penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah berupa uraian kalimat atau narasi (Tanzeh et al., 2020). Setelah melakukan reduksi data, penulis melakukan penyajian data secara terstruktur dan sistematis sehingga data tersebut memiliki pola hubungan yang dapat menghasilkan informasi.

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Sugiyono (2018: 141) penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data, dimana dalam kesimpulan tersebut terdapat makna data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan yang ditarik harus memiliki bukti data yang valid dari tahap pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dilapangan dengan cara mewawancarai informan, mengumpulkan bukti dokumentasi, dan mencari teori yang sejalan dengan penelitian ini, selanjutnya peneliti melakukan interpretasi atas data yang telah didapatkan. Interpretasi atas data yang telah dikumpulkan dilakukan sesuai dengan teori yang mendukung hasil penelitian ini. Adapun hasil analisis terhadap penelitian dan pembahasannya diinterpretasikan sebagai berikut:

Pemahaman Mengenai SIMDA untuk Pengelolaan Keuangan

Secara *general* (umum) para pegawai/staf pada bagian umum sekretariat daerah khususnya yang tugasnya di bidang keuangan sudah memahami makna SIMDA. Pendapat dari para staf bagian keuangan sudah sesuai dengan pengertian SIMDA yang seharusnya. Menurut hasil wawancara dengan salah satu staf yaitu Ibu Siti Rahimah Nurdiana selaku pembuat laporan keuangan sekretariat daerah Kota Mataram mendefinisikan SIMDA sebagai sistem yang dapat membantu membuat laporan keuangan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan PPK-SKPD yaitu Ibu Desi Tri Mariana yang menyatakan bahwa SIMDA merupakan sistem yang membantu para staf mengelola keuangan dimulai dari perencanaan hingga proses pencairan dana. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil wawancara secara menyeluruh dengan seluruh pegawai dibidang keuangan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan suatu aplikasi yang membantu dalam proses pengerjaan keuangan atau mengelola laporan keuangan terutama penatausahaannya dimulai dari perencanaan anggaran hingga proses pencairan dana.

Transaksi-transaksi merupakan data awal yang harus diolah untuk membentuk suatu laporan keuangan. Transaksi tersebut di input ke dalam SIMDA sehingga menjadi sebuah jurnal. Hasil dari jurnal tersebut yang akan diolah oleh SIMDA sehingga membentuk laporan keuangan. Adapun prosedur pengelolaan laporan keuangan dengan menggunakan SIMDA pada bagian umum sekretariat daerah Kota Mataram adalah sebagai berikut: (1) prosedur penganggaran, merupakan tahap awal dalam pengelolaan data keuangan yang akan membentuk anggaran kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Prosedur penganggaran dimulai dari tahap penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) kemudian dilanjutkan dengan penyusunan anggaran kas dan terbentuklah DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) dimana dalam DPA terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan, (2) prosedur penatausahaan pengeluaran kas, merupakan prosedur saat terjadi pengeluaran kas dimulai dari penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang merupakan dasar untuk penerbitan SPP (Surat Perintah Pembayaran). Prosedur keluarnya SPP dimulai dari pembuatan SPP hingga verifikasi SPP. Setelah verifikasi SPP diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan melakukan verifikasi SPM. Setelah verifikasi SPM maka SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) akan terbit dan kemudian melakukan verifikasi SP2D. Setelah itu, membuat SPJ (Surat PertanggungJawaban) dan melakukan pengesahan SPJ. Terakhir adalah melakukan penerimaan dan penyetoran pajak. Dalam aplikasi SIMDA terdapat beberapa jenis pembayaran, yaitu: UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang), TU (Tambah Uang), LS (Langsung), dan Nihil, dan (3) prosedur pelaporan dan akuntansi, dalam penerapan SIMDA prosedur akuntansi terdiri dari memasukkan saldo awal kemudian memasukkan data transaksi dan melakukan koreksi atau penyesuaian jika terjadi kesalahan. Apabila terjadi kesalahan maka memerlukan penyesuaian dengan cara bagian pengurus laporan keuangan sekretariat daerah bersurat kepada BKD bahwa terdapat perubahan, kemudian bagian pelaporan keuangan dari BKD yang akan mengoreksi kesalahan tersebut. Prosedur pelaporan dilakukan ketika laporan keuangan telah selesai dan dikirim datanya kepada Kementerian Keuangan secara online melalui SIMDA.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ermawati (2018) bahwa para pegawai telah memahami makna SIMDA yang merupakan aplikasi untuk mengelola keuangan secara lebih mudah dari proses memasukkan data hingga menjadi laporan keuangan dan penggunaan SIMDA untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi pada bagian umum sekretariat daerah Kota Mataram.

Perbedaan Sebelum dan Sesudah Penggunaan SIMDA pada Bagian Umum Sekretariat Daerah

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari (2019) kualitas yang dapat dilihat dari perbedaan penggunaan SIMDA dengan *Microsoft excel* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Sebelum dan Sesudah Penerapan SIMDA

Hasil Penelitian Terdahulu		Hasil Penelitian Lapangan	
No.	Kualitas	<i>Microsoft excel</i>	SIMDA
1.	Ketepatan	Pengumpulan laporan keuangan tidak tepat waktu, karena sekretariat daerah terdiri dari sembilan bagian-bagian yang laporan keuangannya akan dikonsolidasi pada bagian umum sehingga ketepatan waktu pengumpulan dapat terlewat.	Pengumpulan laporan keuangan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, hal tersebut dikarenakan sembilan bagian dari sekretariat daerah hanya menginput transaksi melalui SIMDA dan selanjutnya akan diproses oleh SIMDA menjadi laporan keuangan.
2.	Ketelitian	Penyusunan laporan keuangan diragukan keakuratannya karena dikerjakan secara manual sehingga rentan terjadi kesalahan dari sekian banyak transaksi yang ada di sekretariat daerah.	Penyusunan laporan keuangan dapat dipercaya karena terdapat rumus-rumus yang telah diatur oleh SIMDA.
3.	Kecepatan	Transaksi laporan keuangan sangat banyak pada bagian umum sekretariat daerah sehingga jika dikerjakan secara manual membutuhkan banyak waktu.	Pengerjaan laporan keuangan walaupun transaksinya banyak dapat cepat diselesaikan karena SIMDA telah mengatur hal-hal tersebut secara otomatis.

Sumber: Data Primer Bagian Umum Sekretariat Daerah, Diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pengelolaan laporan keuangan pada bagian umum sekretariat daerah Kota Mataram lebih baik menggunakan SIMDA daripada mengolahnya dengan *Microsoft excel*. Selain berdasarkan tabel diatas, hasil wawancara dari informan peneliti yang bernama Ibu Desi Tri Mariana selaku PPK-SKPD dan Kasubag bagian keuangan dan aset menyatakan bahwa sebelum menggunakan SIMDA para pegawai menyusun laporan keuangan dengan menggunakan *Microsoft Excel* sehingga rentan terjadi kesalahan dan penyelesaian laporan keuangan menjadi lebih lama, sedangkan setelah menggunakan SIMDA dalam mengelola laporan keuangan menjadi lebih efektif.

Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan laporan keuangan menggunakan *Microsoft excel* membutuhkan waktu yang lebih lama dan keakuratan dalam laporan keuangannya dapat diragukan, hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2019).

Keberhasilan Program Pemerintah Menerapkan SIMDA pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mataram

Hal utama yang dapat dilihat dalam keberhasilan program SIMDA pada sekretariat daerah Kota Mataram khususnya bagian umum adalah kemudahan dalam mengaplikasikan program tersebut bagi staf keuangan sekretariat daerah. SIMDA hanya membutuhkan jaringan internet dan komputer agar dapat diakses. Selain itu, hal lain yang dapat dilihat dari keberhasilan program SIMDA adalah ketepatan dan kecepatan waktu dalam menangkap perintah. Penangkapan perintah disini memiliki arti kecepatan dan ketepatan dalam mengolah data keuangan, dimulai dari memasukkan transaksi hingga menjadi laporan keuangan.

Kemudian unsur lain yang mendukung keberhasilan program adalah tampilan SIMDA yang

sederhana dan mudah dipahami oleh para staf, seperti penggunaan Bahasa Indonesia dalam aplikasi tersebut sehingga memudahkan staf yang tidak bisa berbahasa asing untuk menggunakannya. Selain itu, setiap akun yang menggunakan SIMDA memiliki kode sandi (*password*) masing-masing sehingga keamanan akun pengguna terjamin.

Berdasarkan hasil wawancara seluruh staf keuangan sekretariat daerah Kota Mataram (lihat lampiran hasil wawancara) dan indikator keberhasilan program yang efektif menurut Campbell dalam Firdaus (2017), dapat disimpulkan bahwa program pemerintah menerapkan SIMDA di bagian umum sekretariat daerah sudah berhasil sehingga tujuan pemerintah menerapkan SIMDA juga dikatakan berhasil menurut BPKP (2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangestika et al., (2016) bahwa pemerintah telah berhasil dalam menerapkan SIMDA pada sekretariat daerah Kota Mataram sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih baik.

Keberhasilan Sasaran Penerapan SIMDA

Hal utama yang dapat dilihat dari keberhasilan sasaran penggunaan SIMDA pada sekretariat daerah adalah aplikasi tersebut sangat berprioritas pada keakuratan, ketepatan dan kecepatan dalam menyusun laporan keuangan. selain itu dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan selanjutnya. Kemudian keberhasilan sasaran penggunaan SIMDA dapat dilihat pula dari kemudahan membandingkan laporan keuangan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang sehingga tergolong efektif dalam membantu pengguna laporan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai laporan keuangan secara cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dan indikator keberhasilan program yang efektif menurut Campbell dalam Firdaus (2017) menunjukkan bahwa sasaran pemerintah dalam menerapkan SIMDA telah berhasil di OPD sekretariat daerah Kota Mataram. Hal tersebut sangat membantu bagi pemerintah daerah dan seluruh jajarannya dalam mengelola laporan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah namun dengan hasil yang baik dan lengkap.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2019) bahwa keberhasilan sasaran dalam penerapan SIMDA telah terorganisir dengan baik sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).

Kepuasan Pengguna SIMDA

Menurut Campbell dalam Firdaus (2017) bahwa kepuasan terhadap program dapat diukur berdasarkan apa dirasakan oleh orang-orang yang menggunakannya, sehingga dapat melihat kualitas dari program tersebut. Indikator kepuasan para pegawai dan staf bagian umum sekretariat daerah juga tidak kalah penting dari yang lain. Kepuasan pengguna SIMDA dapat menentukan seberapa nyaman dan mampu mereka dalam mengaplikasikan SIMDA.

Hal utama yang dapat dilihat dari kepuasan pengguna SIMDA pada sekretariat daerah adalah kepuasan akan tampilan layar (*interface*) aplikasi tersebut yang sangat sederhana (*simple*) sehingga para staf merasa nyaman dalam menggunakannya. Kemudian para staf merasa puas dengan output yang dihasilkan oleh SIMDA, yaitu laporan keuangan yang akurat dan lengkap sehingga jika terdapat kekeliruan yang terjadi dapat terdeteksi secara langsung. Selain itu, para staf merasa puas dengan kecepatan dan ketepatan waktu dalam menggunakan SIMDA sehingga dapat lebih cepat menyelesaikan pekerjaan. Para staf juga merasa puas akan informasi-informasi mengenai keuangan yang didapatkan melalui aplikasi SIMDA.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018), Firdaus (2017), Pangestika (2016), dan Wulandari (2019) bahwa para pegawai merasa puas dan terbantu dengan adanya SIMDA untuk membantu dalam mengelola laporan keuangan pada sekretariat daerah

Kota Mataram.

Kesesuaian Hasil Penerapan SIMDA

Menurut Campbell dalam Firdaus (2017) tolak ukur efektivitas untuk kesesuaian input dengan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan dengan keluaran. Pada sekretariat daerah Kota Mataram perbandingan input dengan output tidak pernah mengalami perbedaan karena jika para staf menginput hal yang berbeda SIMDA otomatis tidak bisa terisi. Menurut Ibu Susan Arini selaku bendahara pengeluaran bagian administrasi pembangunan menyatakan bahwa semua telah diatur oleh SIMDA, jika kas untuk triwulan pertama sebesar Rp. 100.000.00,00 yang diperbolehkan untuk digunakan maka, apabila melewati hal tersebut SIMDA secara otomatis tidak dapat diisi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Aidin selaku bendahara pengeluaran bagian organisasi bahwa dalam setiap triwulan anggaran telah dibagi sehingga jika anggaran untuk triwulan satu misalnya melebihi batas maka tidak akan bisa di input.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian hasil input dengan output dapat dikatakan telah efektif. Hal ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Campbell dalam Firdaus (2017) tolak ukur efektivitas untuk kesesuaian input dengan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan dengan keluaran. Jika input tidak sesuai dengan output maka dapat dikatakan bahwa program tersebut tidak efektif. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Hamilton dalam Hertanto (2017) laporan keuangan yang efektif memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Laporan Keuangan Efektif

No.	Kriteria Menurut Hamilton	Hasil Penelitian Lapangan
1.	Dapat dipercaya	Laporan keuangan yang dihasilkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dapat dipercaya. Sesuai dengan pemaparan oleh informan peneliti, laporan keuangan yang telah dibuat di SIMDA terlebih dahulu melalui tahap verifikasi yang dilakukan oleh verifikator bagian umum sekretariat daerah Kota Mataram. Verifikator akan mengecek kembali laporan-laporan tersebut telah sesuai atau tidak dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
2.	Ketepatan	Laporan keuangan yang dihasilkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) memiliki ketepatan yang baik dari segi bentuk laporan maupun formatnya. Sesuai dengan pemaparan informan peneliti, laporan keuangan pada bagian umum sekretariat daerah Kota Mataram dilakukan rekonsiliasi.
3.	Tepat waktu	Laporan keuangan yang dihasilkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dilaporkan secara tepat waktu. Sesuai dengan pemaparan informan peneliti bahwa SIMDA secara online dapat mentransfer dokumen laporan keuangan langsung kepada kementerian keuangan sehingga pelaporannya dapat dilaksanakan secara tepat waktu.
4.	Bentuk-bentuk laporan	Laporan keuangan yang dihasilkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sesuai dengan peraturan yang ada. Sesuai pemaparan informan peneliti, laporan keuangan bagian umum sekretariat daerah mematuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAP). Laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIMDA antara lain: (1) jurnal, (2) laporan realisasi anggaran, (3) laporan operasional, (4) laporan perubahan ekuitas, (4) jurnal penyesuaian, dan laporan pertanggungjawaban (SPJ)

Sumber: Data Primer Bagian Umum Sekretariat Daerah, Diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIMDA sudah sesuai dengan kriteria laporan keuangan yang efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hertanto (2017) bahwa laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA tidak hanya memenuhi kriteria laporan keuangan yang efektif menurut Hamilton dalam namun juga memenuhi kriteria laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Faktor-Faktor Pendukung dalam Menerapkan SIMDA Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram

Komunikasi. Menurut Edward dalam Nurani (2018) komunikasi yang baik dan terarah dapat membantu para implementor atau pelaksana kebijakan dapat menerapkan kebijakan yang baik. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Manossoh (2017) implementasi atau penerapan sebuah kebijakan memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain.

Penerapan SIMDA pada bagian umum sekretariat daerah Kota Mataram dikatakan berhasil karena faktor pendukung seperti komunikasi berjalan dengan lancar. Komunikasi antara atasan dengan pegawainya terjalin dengan baik, para pegawai sangat aktif dalam bertanya mengenai hal-hal yang mereka kurang pahami dari penerapan SIMDA kepada atasannya. Jika atasannya mengetahui jawabannya maka jawaban tersebut akan dijelaskan langsung kepada para pegawai, namun jika kurang memahami maka pertanyaan tersebut akan ditampung untuk ditanyakan kepada pihak lain yang lebih ahli dalam hal tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Hertanto (2017), komunikasi harus luas dan mampu untuk berkoordinasi dengan pihak lain agar implementor dapat memahami suatu kebijakan secara lebih luas dan terarah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) bahwa komunikasi mendukung penerapan SIMDA sehingga dapat berjalan dengan baik.

Sumber Daya. Menurut Edward dalam Nurani (2018) menyatakan jika suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik namun sumber dayanya tidak memadai baik itu dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain maka kebijakan itu implementasinya tidak akan berjalan dengan efektif.

Sumber daya pada sekretariat daerah Kota Mataram khususnya bagian umum dapat dikatakan sudah memadai dari segi jaringan, perangkat lunak *hardware* dan *software*, dan keahlian sumber daya manusianya. Namun, menurut Ibu Siti Maysaroh selaku bendahara pengeluaran pembantu bagian protokol dan komunikasi pimpinan (prokopim) sekretariat daerah Kota Mataram mengatakan bahwa jika dilihat dari sumber daya seperti server untuk sekretariat daerah masih kurang karena untuk SIMDA sampai sekarang kita terpusat di bagian umum, sehingga para staf keuangan yang ruangnya terletak di lantai dua dan tiga harus turun ke lantai satu untuk melakukan *entry* data. Keahlian sumber daya manusia yang terdapat pada sekretariat daerah Kota Mataram dapat dikatakan sudah memadai namun, menurut Ibu Baiq Marniati selaku bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kota Mataram. Beliau menyatakan bahwa banyak pegawai yang sudah menua sehingga kecepatan dan kecekatan serta ketelitian dalam menginput data mengalami penurunan. Selain itu, pegawai baru yang masuk ke sekretariat daerah Kota Mataram tidak pernah memiliki pengalaman dalam mengelola laporan keuangan, sehingga mereka membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari hal tersebut.

Faktor penghambat yang dapat peneliti temukan pada sumber daya khususnya keahlian para pegawai adalah dipengaruhi oleh faktor usia dan pendidikan. Faktor usia menyebabkan kecepatan dan ketepatan saat mengolah data mulai menurun tidak seperti sumber daya manusia yang masih muda dan segar sehingga dapat lebih cepat dalam menginput data. Kemudian dari segi faktor pendidikan terdapat pegawai yang tidak ahli dalam menyusun laporan keuangan sehingga perlu

diberikan pelatihan.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manossoh (2017) bahwa penerapan SIMDA didukung oleh sumber daya manusia yang ahli atau handal dalam menggunakan aplikasi SIMDA. Selain itu didukung oleh sumber daya perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) serta jaringan internet.

Disposisi/Sikap. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Hertanto (2017) disposisi implementor terdiri dari respon dan pemahaman para pelaksana kebijakan mengenai kebijakan tersebut. Sedangkan menurut Edward dalam Nurani (2018) jika sikap dari implementor atau pelaksana kebijakan berbeda dengan sikap pembuat kebijakan maka, kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif.

Peneliti menemukan adanya semangat dan respon yang baik oleh para pegawai dengan diterapkan SIMDA di sekretariat daerah Kota Mataram ini. Mereka menyadari bahwa penggunaan SIMDA dapat membantu mereka dalam mengelola laporan keuangan secara praktis sehingga pekerjaan tidak banyak yang menumpuk seperti saat mengerjakan laporan keuangan secara manual dengan menggunakan *Microsoft excel*. Disamping itu, selain respon yang baik dari para pegawai diperlukan pemahaman untuk apa kebijakan penerapan SIMDA ini dibuat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manossoh (2017) bahwa respon dan pemahaman yang baik dari karyawan akan membuat penerapan SIMDA menjadi efektif dan optimal.

Struktur Birokrasi. Menurut Edward dalam Nurani (2018) bahwa dalam menjalankan kebijakan memerlukan kerjasama dengan banyak orang. Hal yang berpengaruh dalam struktur organisasi adalah tingkat pengawasan terhadap para pelaksana kebijakan. Tingkat pengawasan pada sekretariat daerah Kota Mataram berlapis-lapis, dari segi controllingnya, dari segi pertama input data, kemudian di verifikasi, dan dilakukan rekonsiliasi. Selain itu, SIMDA tidak pernah mengalami kegagalan sistem pada sekretariat daerah Kota Mataram karena selalu diawasi oleh badan yang membuat yaitu BPKP melalui perantara dengan BKD sehingga yang dapat menggunakan SIMDA *online* hanya orang-orang tertentu yang diberikan izin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) bahwa pengaplikasian SIMDA tidak pernah mengalami kegagalan sistem, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengawasan di sekretariat daerah Kota Mataram dapat dikategorikan baik. Jika terjadi kesalahan hanya disebabkan oleh *human error* bukan dari sistem SIMDA itu sendiri.

Efektivitas Penerapan SIMDA Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mataram

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada bagian umum sekretariat daerah Kota Mataram dikatakan sudah efektif. Hal ini berdasarkan pada teori pengukuran efektivitas menurut Campbell dalam Baria (2019) bahwa terdapat beberapa indikator dalam pengukuran Efektivitas yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, dan kesesuaian input dengan output.

Indikator keberhasilan program, seperti yang telah diuraikan diatas bahwa program pemerintah dalam menerapkan SIMDA untuk pengelolaan keuangan di bagian umum sekretariat daerah telah berhasil. Para pegawai sangat memahami mengenai SIMDA dari proses menginput hingga menghasilkan output. Kemudian indikator kedua yaitu keberhasilan sasaran, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran penerapan SIMDA adalah OPD di Kota Mataram dan hal tersebut telah berhasil dilakukan oleh pemerintah dan kebijakannya telah dijalankan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Selanjutnya indikator ketiga adalah kepuasan terhadap program, dalam hal kepuasan terhadap program SIMDA seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, para pegawai sekretariat daerah Kota Mataram khususnya pada bagian umum merasa sangat puas dengan adanya program tersebut. Hal itu dikarenakan dengan menginput transaksi saja setelahnya SIMDA

yang akan mengelola seluruh transaksi tersebut menjadi laporan keuangan. Terakhir, indikator kesesuaian input dan output, seperti yang telah penulis uraikan di atas bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIMDA memenuhi kriteria laporan keuangan efektif dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018), Pangestika dan Sari (2016), dan Wulandari (2019) berpendapat bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada masing-masing pemerintah daerah telah berjalan secara efektif atau sudah terorganisir dengan baik dan dibantu dengan faktor-faktor pendorong yang ada sehingga membuat penerapan SIMDA menjadi lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sudah efektif dijalankan pada sekretariat daerah Kota Mataram khususnya bagian umum. Sesuai dengan pengukuran efektivitas menurut Campbell yaitu, keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan pengguna, dan kesesuaian input dengan output.

Kebijakan penerapan SIMDA pada bagian umum sekretariat daerah Kota Mataram telah berhasil dan para pegawai merasa senang dengan adanya program tersebut. Kesesuaian hasil yang dihasilkan dengan menggunakan SIMDA memenuhi kriteria laporan keuangan yang efektif yaitu, dapat dipercaya, ketepatan, tepat waktu, dan bentuk-bentuk laporan. Selain itu efektivitas penerapan SIMDA di dorong oleh beberapa faktor, pertama adalah komunikasi, antara pimpinan dengan para pegawai serta pihak lain sudah berjalan dengan baik dan dilakukan dengan aktif, kemudian yang kedua adalah sumber daya, sumber daya manusia maupun sumber daya perangkat lunak dan keras serta sumber daya jaringan sudah memadai namun, terdapat hambatan pada bagian server dan pegawai baru, faktor selanjutnya disposisi/sikap, respon para pegawai dengan adanya SIMDA sangat baik dan bersemangat, dan faktor terakhir adalah struktur birokrasi, tingkat pengawasan yang ada berlapis dimulai dari pengawasan dari atasan langsung, verifikasi data oleh verifikator dan melakukan rekonsiliasi tiap bulan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi penelitian baik secara teoritis, praktis dan kebijakan. Implikasi penelitian secara teoritis dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca tentang efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Secara teoritis juga menambah pengetahuan mengenai teori implementasi kebijakan, dimana suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik jika implementasinya atau pelaksana kebijakannya tidak menjalankan kebijakan tersebut dengan baik. Begitu pula sebaliknya, implementasi tidak dapat dilakukan dengan baik apabila kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik.

Implikasi dari penelitian ini bagi para pegawai sekretariat daerah Kota Mataram adalah dapat dijadikan sebagai acuan dalam menerapkan SIMDA menjadi lebih efektif. Selain itu implikasi penelitian ini secara praktis bagi pemerintah adalah dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan sistem-sistem baru agar dapat berjalan efektif seperti penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ini.

Saran yang dapat peneliti ajukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan SIMDA untuk pengelolaan keuangan pada sekretariat daerah Kota Mataram adalah lebih meningkatkan serta mengembangkan *server* agar SIMDA dapat diaplikasikan oleh para bendahara-bendahara dan pegawai keuangan di ruangan mereka masing-masing. Selain itu, kualifikasi pendidikan dan kompetensi harus diperhatikan untuk calon pegawai bagian keuangan karena terdapat beberapa pegawai yang belum pernah mempelajari mengenai penyusunan laporan keuangan sehingga tidak dapat menyusun laporan keuangan dengan baik sehingga memerlukan pelatihan terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, M. R., & Riharjo, I. B. (2019). *Peran Akuntansi dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 8(1), 6. Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/1859/1867/>
- Baria, K. (2019). *Efektivitas Pelayanan Kartu Macca Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unuversitas Muhammadiyah Makassar 2019, 53(9), 1689–1699. Retrieved from www.journal.uta45jakarta.ac.id
- BPKP (2021). *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)*. Retrieved from <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp>
- Ermawati. (2018). *Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pada Pemerintah Kota Makassar*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar) Retrieved from https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2784-Full_Text.pdf
- Firdaus, K. (2017). *Efektifitas Layanan Mobile Application*. Unair, 6(4), 1–28. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-lna13ce4a8cefull.pdf>
- Ganevie, M. (2018). *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu Berdasarkan SAP*. Retrieved from <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8090>
- Hertanto, Y. (2017). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektifitas Pelaporan Keuangan*. 283. Retrieved from <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/1424/910>
- Nur. (2021, September 1). *Ungkap Kasus Longsor Senggigi, NTB*. Lombokpost. Retrieved from <https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/01/09/2021/dewan-minta-polres-lebih-serius-ungkap-kasus-longsor-senggigi/>
- Manossoh, H. (2017). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado*, 32. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/accountability/article/download/14426/13999>
- Muhammad, F. (2018). *Fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial*. Retrieved from <https://www.google.co.id/books/edition/Fenomenologi/lx1DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fenomenologi&printsec=frontcover>
- Pangestika, A. dan Sari, Y. P. (2016). *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemn Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal*. Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT), 1–4. Retrieved from <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/prosiding/article/view/372/356>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020*. (2020). 1–445.
- Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. (2010). 76–99.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010*. (2010). *International Institute for Environment and Development*, 07/80(2), 125. Retrieved from https://arxiv.org/pdf/1707.06526.pdf%0Ahttps://www.yrpri.org%0Ahttp://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000%0Ahttps://www.fordfoundation.org/%0Ahttp://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Republica_Dominicana/ccp/20120731051903/rep%0Ahttp://webpc.cia
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I.02 PSAP 01-6)*. (2016). *Penyajian Laporan Keuangan*, 1, 24. Retrieved from <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEWjboYLY75jNAhVBp5QKHTPVCE0QFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fstaff.blog.ui.ac.id%2Fmartani%2Ffiles%2F2011%2F04%2FED-PSAK->

- 1.pdf&usg=AFQjCNFBiJ9pm7nmkVsp8fxaH6M4Soj3dA&sig2=C
- Pombengi, J. D. (2018). *Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Wanea Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik, 4(58). Retrieved from <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19779/19378>
- Sedianingsih, Mustikawati, F., & Soetanto, N. P. (2010). *Teori dan Praktik Administrasi Kesekretariatan* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Nag. (2018, Maret 1). *Problematika Otonomi Daerah Zaman Now!*. Sindonews. Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/berita/1285969/18/problematika-otonomi-daerah-zaman-now/10>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (Ed.); 3rd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, D. (2020). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Pemerintah Kabupaten Sarmi. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 5(2), 174–198. Retrieved from <http://ejournal.uncen.ac.id/index.php/KEUDA/article/view/1287/1057>
- Wulandari, D. (2019). *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada Dppka Kabupaten Kepulauan Sangihe*, 3Wulandari(2), 114–122. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/8361/7932>